

Pendapatan Retribusi Daerah- Oknum RT Diduga Pungli Sejumlah PKL di Kel. Maroangin Resah



Sumber gambar:

<https://palopos.fajar.co.id/2024/06/10/oknum-rt-diduga-pungli-sejumlah-pkl-di-kel-maroangin-resah/>

Seorang oknum ketua RT di Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua, Kota **Palopo**, diduga melakukan Pungutan Liar (Pungli) ke beberapa Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan tepi jalan poros Maroangin.

Oknum RT tersebut berinisial BA. Praktik 'haram' kejduan tersebut telah lama dilakukan. Dan terungkap saat dua PKL masing-masing berinisial M dan F Curhat kepada **Palopo** Pos, soal sikap arogan oknum tersebut saat menagih setoran bulanan.

"Dari Januari 2024 saya jualan di situ. Awalnya, saya ditanya sama orang yang lebih dulu menjual di lokasi tersebut. Dia bilang ke saya, kalau mau buka usaha di situ harus melapor dulu sama ibu RT. Dari situ saya langsung datang ke ibu RT untuk minta izin buka usaha di lokasi pinggir jalan itu. Memang dikasi izin tapi harus ada setoran bulanan. Pertama dia minta agak mahal kemudian saya tawar makanya sepakat Rp200 ribu perbulan," kata sumber **Palopo** Pos yang merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi di **Palopo**, Sabtu, 8 Juni 2024 lalu.

Kedua korban yang buka usaha itu, ada yang jualan ayam geprek dan ada pula voucher. Dulunya sempat berpikir bahwa uang yang disetor ke oknum tersebut akan disetor ke **Kantor**

Lurah. Akan tetapi setelah mereka telusuri, ternyata itu semua merupakan inisiatif pribadi dari oknum RT tersebut dan uang yang didapat digunakan untuk kepentingan pribadi.

"Kira-kira dua bulan lalu, ibu RT itu datang menagih uang bulanan padahal belum waktunya kami menyettor ke dia. Waktu itu saya tanya ke ibu RT kalau belum waktunya bayar tagihan bulanan bu, tapi ibu RT bilang dia sangat butuh uang karena ada yang perlu dia bayar. Dari bahasanya ibu RT itu sampai terbuka semua kalau uang yang saya dan teman setor ke dia selama ini, ternyata hanya untuk keperluan pribadinya saja," kata sumber sembari menirukan cara menagih oknum RT yang diduga pungli itu.

Setoran yang diterima oleh oknum RT dari dua orang PKL itu, berbeda-beda. Jika korban inisial M menyettor Rp200 ribu perbulan. Sedang F menyettor Rp300 ribu perbulan.

"Kalau saya kak lebih mi satu tahun saya setor ke ibu RT. Mulai dari tahun lalu. Saya setor Rp300 ribu perbulan," kata F saat dijumpai sebelumnya.

Beberapa bulan lalu, permasalahan ini juga sempat diupayakan oleh kedua korban agar diselesaikan secara kekeluargaan di kantor lurah. Akan tetapi saat upaya tersebut dilakukan dan kedua korban mendatangi kantor lurah setelah janji dengan lurah, oknum RT yang lakukan Pungli tersebut tidak pernah meluangkan waktunya untuk hadir.

Lurah Maroangin, Attriana yang dikonfirmasi, membenarkan kejadian itu. Namun, ia menegaskan bahwa perbuatan oknum RT tersebut tidak ada kaitan dengan kelurahan.

"Baru saya tahu juga kalau ada yang seperti itu. Dan kami tidak pernah sama sekali menyuruhnya (BA) untuk menarik retribusi dari adik-adik yang berjualan ini. Justru saya sangat senang dan mendukung kalau mereka mau berusaha mandiri seperti itu. Kalau ada yang begitu, mungkin untuk pribadinya," kata Attriana.

Meski belum ada penyelesaian, permasalahan ini sempat mereda. Tapi oknum RT yang 'nakal' itu kembali mendatangi lapak korban dan melakukan intimidasi sehingga membuat korban trauma, terutama korban inisial M sampai memilih untuk pindah tempat berjualan.

"Beberapa minggu lalu datang lagi itu ibu RT marah-marah, nabilangi ka' kurang ajar mulutmu. Mungkin masih marah ke saya. Tapi mau mika juga angkat gerobakku dari situ karena percuma saya bertahan di situ kalau tidak tenang dan aman saya rasa jualan di situ," keluhnya. **(ria/ikh)**

Adapun dalam hal tersebut, Siap-siap! Iuran sampah di Kota Makassar bakal naik.

Pemerintah Kota [Makassar](#) akan memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari retribusi sampah.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, jumlah pendapatan retribusi sampah setiap tahunnya diangka Rp35 miliar.

Hal ini tak sebanding dengan subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani masalah persampahan.

Plt Kepala DLH Kota Makassar Ferdi Mochtar mengatakan subsidi setiap tahunnya untuk penanganan sampah mencapai Rp200 miliar.

Itu mencakup pengadaan hingga pemeliharaan infrastruktur sampah atau transportasi dan alat angkut sampah.

Anggaran Rp200 miliar itu juga sudah termasuk biaya untuk membayar insentif petugas sampah.

Karenanya, Pemkot [Makassar](#) akan melakukan penyesuaian terhadap retribusi sampah.

Sebab, nilai yang ada sekarang ini dianggap sudah tidak relevan.

"Sekarang kota sedang godok perwalinya. Sudah di bagian hukum, dan kita akan bahas teknis bersama tim ahli hukum Pemerintah [Makassar](#)," ucap [Ferdie Mochtar](#), Selasa (25/6/2024).

Kata Ferdi, penyesuaian ini harus dilaksanakan sebab merupakan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan pada 5 Januari lalu.

Rancangan peraturan wali kota tersebut kata Ferdi juga telah dipaparkan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Perwali ini kami sudah presentasikan di Kemendagri, karena ada keterkaitan dengan retribusi dan angka-angka, itu sudah kita diskusikan sampai di mana dapatkan turunan-turunan, mulai misalnya di tingkat rumah tangga miskin, menengah ke atas yang masing-masing berbeda tarif," paparnya.

Ferdi mencontohkan, retribusi sampah untuk keluarga miskin nilainya Rp25 ribu.

Hal tersebut disesuaikan dengan tarif listriknya, kalau misalnya Rp 900 watt ke bawah, nilainya Rp25 ribu per bulan.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Berdasarkan perwali yang berlaku sebelumnya, tagihan sampah untuk keluarga miskin Rp16 ribu per bulan.

"Jadi ada kenaikan kurang lebih sekitar Rp9.000, tapi kita tetap melihat perkembangan ditingkat masyarakat, makanya nanti ada perbaikan-perbaikan, tentunya kita akan rapatkan dan diskusikan kembali," ulasnya.

"Tapi kita juga melihat seberapa besar kontribusi pelayanan kita terhadap penanganan persampahan yang selama ini banyak di subsidi oleh pemerintah," sambungnya.

Terpisah, Wali Kota [Makassar Danny Pomanto](#) menyampaikan akan melakukan efisiensi terhadap seluruh armada sampah.

Danny merencanakan pembelian armada sampah listrik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2024.

Danny berharap dengan menggunakan armada listrik, tidak ada lagi kebocoran anggaran operasional, khususnya dalam pembelian bahan bakar minyak.

Sehingga tidak ada lagi alasan tidak mengoperasikan armada karena tidak ada BBM.

Selain itu, untuk menghindari kebocoran iuran atau retribusi sampah, pembayarannya akan menggunakan aplikasi Pakinta'.

"Jadi tidak adami lagi yang bisa disalahgunakan. Langsung dibayar pakai Qris menggunakan

Sumber Berita:

1. <https://palopopos.fajar.co.id/2024/06/10/oknum-rt-diduga-pungli-sejumlah-pkl-di-kel-marolangin-resah/>
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/06/25/siap-siap-iuran-sampah-di-makassar-bakal-naik-warga-miskin-rp25-ribu-per-bulan>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

- d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.